

PERAN KERJASAMA DALAM PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA RATAWANGI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Indah Isneni Putri¹, Wawan Risnawan², Imam Maulana Yusuf³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : puputisnaeni02@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Desa Ratawangi masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek kerja sama antar pihak pelaksana. Minimnya koordinasi, kurangnya pelibatan masyarakat, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban menjadi kendala utama yang berdampak pada keberlangsungan dan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama dalam implementasi Program Demapan di Desa Ratawangi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Weimer dan Vining, yang menekankan indikator partisipasi, koordinasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari perangkat desa, pengelola BUMDes, penyuluh pertanian, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak dalam implementasi Program Demapan belum berjalan secara maksimal. Koordinasi antaraktor masih bersifat insidental dan tidak terstruktur, partisipasi masyarakat belum merata dalam setiap tahap program, serta akuntabilitas pelaksanaan program kurang dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Peran kerja sama sangat menentukan keberhasilan implementasi program. Diperlukan peningkatan intensitas koordinasi, pelibatan masyarakat secara aktif, serta transparansi dalam pelaksanaan agar tujuan kemandirian pangan desa dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Kerja Sama, Implementasi Kebijakan, Program Demapan, Ketahanan Pangan.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembanguan berkelanjutan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim, krisis ekonomi global, dan kerentanan distribusi pangan di wilayah perdesaan.

Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil, memiliki peran penting dalam membentuk sistem pangan yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menginisiasi Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) sebagai upaya memperkuat

kemandirian pangan berbasis lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi desa secara optimal.

Program Demapan dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Namun, implementasi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam aspek kerja sama antaraktor pelaksana. Kerja sama lintas pemangku kepentingan menjadi komponen krusial yang menentukan keberhasilan program di lapangan. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyuluh pertanian, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator penting yang harus berjalan secara sinergis.

Kerja sama dalam implementasi kebijakan publik, khususnya di tingkat desa, tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan penyelarasan kepentingan, pertukaran informasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kolaborasi yang efektif mendorong terjadinya inovasi kebijakan dan adaptasi terhadap kondisi lokal, sekaligus memperkuat rasa memiliki dari semua pihak yang terlibat. Dalam program Demapan, kerja sama yang ideal bukan hanya bersifat administratif atau formalitas dalam rapat koordinasi, tetapi mencerminkan integrasi fungsi antar

lembaga, dialog terbuka, dan akuntabilitas bersama dalam pencapaian tujuan program. Sayangnya, kerja sama seringkali terkendala oleh fragmentasi kelembagaan, ego sektoral, keterbatasan komunikasi, serta lemahnya sistem koordinasi dan evaluasi lintas pihak. Oleh karena itu, memahami secara mendalam bagaimana kerja sama dijalankan dalam konteks lokal menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang selama ini menghambat keberhasilan program. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada desain kebijakan dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas koordinasi dan kolaborasi yang terjalin antar pelaksana (Weimer & Vining, 2017). Permasalahan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Program Demapan di beberapa desa, termasuk Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, masih menghadapi kendala koordinasi yang bersifat insidental, minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas pelaksanaan program.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama dalam implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ratawangi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya peningkatan efektivitas kerja sama

antar pihak pelaksana. Fokus pada dimensi kerja sama menjadi kontribusi penting dalam pengembangan studi implementasi kebijakan di tingkat lokal, karena hingga saat ini belum banyak kajian yang menelaah aspek kolaboratif secara mendalam dalam konteks program pangan desa berbasis partisipatif di wilayah Kabupaten Ciamis.

Dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika kerja sama dalam implementasi kebijakan publik serta menjadi rujukan dalam perumusan strategi kebijakan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam mengenai peran kerja sama dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Informan dipilih melalui purposive sampling, terdiri dari 11 orang yang terlibat langsung dalam program, seperti Kepala Desa, pengelola BUMDes, penyuluh pertanian, dan masyarakat penerima manfaat.

Data yang digunakan meliputi data primer (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi lapangan) dan data sekunder (dokumen program dan

kebijakan desa). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dalam implementasi Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Desa Ratawangi telah melibatkan berbagai aktor, antara lain Pemerintah Desa, BUMDes, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis. Kerja sama ini tampak pada tahap perencanaan, pendampingan teknis, dan evaluasi. Namun, hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh di semua tahapan.

1. Partisipasi masyarakat, misalnya, cenderung hanya terjadi pada tahap sosialisasi awal. Banyak warga yang masih memposisikan diri sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai subjek aktif dalam program. Hal ini terlihat dari pernyataan informan penerima manfaat yang mengaku hanya dilibatkan pada saat pendataan awal atau ketika penyaluran bantuan. Mereka

jarang terlibat dalam proses penyusunan rencana, pengambilan keputusan, maupun evaluasi program. Informasi yang mereka peroleh pun terbatas pada bentuk bantuan yang diterima, tanpa penjelasan utuh mengenai tujuan jangka panjang program.

Beberapa juga informan menyebutkan bahwa keputusan mengenai bentuk program, pemilihan penerima manfaat, hingga alokasi bantuan sudah ditentukan sepenuhnya oleh pihak desa. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam implementasi Program Demapan masih bersifat top-down. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis partisipatif. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Weimer dan Vining (2017) yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

Hal ini selaras dengan konsep Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969:216), yang membagi partisipasi warga ke dalam delapan tingkat partisipasi, mulai dari non-partisipasi hingga kendali warga (citizen control). Berdasarkan temuan di lapangan, bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Desa Mandiri Pangan

(Demapan) di Desa Ratawangi lebih cocok dikategorikan dalam tingkat tokenism, khususnya pada level informasi dan konsultasi. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya diberi akses terhadap informasi atau diikutsertakan dalam forum diskusi tanpa memiliki kekuatan nyata dalam memengaruhi keputusan yang diambil. Meskipun masyarakat hadir secara fisik dalam musyawarah atau sosialisasi, mereka belum dilibatkan secara substantif dalam penyusunan program maupun evaluasi pelaksanaan.

2. Dalam hal koordinasi, kerja sama antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan penyuluh pertanian memang dilakukan, tetapi lebih dominan pada tahap awal program. Rapat koordinasi secara resmi umumnya hanya diadakan dua kali dalam setahun, yaitu saat perencanaan dan evaluasi program. Selebihnya, koordinasi bersifat insidental dan berlangsung ketika muncul kendala teknis atau agenda mendesak. Sebagian besar koordinasi dilakukan secara informal melalui komunikasi lisan atau media seperti WhatsApp, tanpa dokumentasi maupun prosedur yang sistematis. Kondisi ini menimbulkan ketidakteraturan dalam alur kerja sama, yang berdampak pada lemahnya pengawasan serta keterlambatan dalam

mendeteksi masalah di lapangan.

Monitoring dan evaluasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari siklus implementasi berjalan kurang intensif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan jadwal antarinstansi pelaksana, serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk mengatur pola kerja sama lintas pihak. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak terstruktur dan sangat bergantung pada inisiatif individu atau instansi tertentu. Temuan ini menguatkan hasil studi Prasjo dan Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa ketiadaan SOP menyebabkan lemahnya

koordinasi dan rendahnya efektivitas pelaksanaan program-program desa.

Situasi tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Wawan Risnawan dan Etih Henriyani (2023) dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh, yang mengkaji bentuk *collaborative governance* dalam promosi wisata Situ Lengkong Panjalu. Penelitian mereka menekankan bahwa keberhasilan program desa sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga yang terstruktur, forum komunikasi rutin, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam siklus program. Mereka menunjukkan bahwa tanpa forum koordinasi formal dan SOP yang jelas, kolaborasi hanya akan berjalan secara insidental dan tidak berkelanjutan.

3. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menunjukkan kelemahan. Informasi program memang disampaikan melalui forum Musyawarah Desa dan laporan pertanggungjawaban tahunan, namun penyampaian tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Selain itu, akuntabilitas pelaksanaan program masih bersifat administratif dan belum melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Hanya segelintir informan yang mengetahui hasil evaluasi program secara menyeluruh. Padahal, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang melibatkan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong rasa memiliki terhadap program. Dalam hal ini, belum ada sistem dokumentasi dan pelaporan yang dapat diakses publik secara terbuka,

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006:140) yang menyatakan bahwa “pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dengan cara menyediakan informasi yang cukup, menjamin akses masyarakat, dan merespons umpan balik secara terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama

dalam implementasi Program Demapan di Desa Ratawangi masih berjalan secara parsial dan belum terlembaga dengan baik. Ketidakterpaduan antaraktor pelaksana serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam menciptakan sinergi pelaksanaan yang efektif. Dua temuan penting dari penelitian ini adalah, pertama, kerja sama antar pelaksana cenderung tidak merata intensif pada tahap awal tetapi menurun dalam pelaksanaan lanjutan seperti monitoring dan evaluasi. Kedua, partisipasi masyarakat dalam program masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara substantif dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur, penyusunan SOP yang jelas, serta pendekatan pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam keseluruhan proses program.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Darwis, V., & Rusastra, I. W. (2016). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Demapan. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 22(1), 43–58.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, D. N. (2019). Metode penelitian kualitatif untuk administrasi publik dan kebijakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Julianto, A. (2021). Teknik dan pendekatan dalam penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Birokrasi dan tata kelola desa: Teori dan praktik implementasi kebijakan publik di level desa. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Risnawan, W., & Henriyani, E. (2023). Collaborative governance dalam promosi destinasi wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Publik Universitas Galuh*, 11(2), 95–106. Diakses dari <https://bkik.unigal.ac.id>
- Sari, N. Y., & Sadono, D. (2018). Partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 123–132.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy analysis: Concepts and practice (6th ed.). New York: Routledge.